



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD LUTHFI H. RAHMATULLAH
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 231568

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.561.850.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 743.250.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 650.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 230 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 28.7 m2/28.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 361.300.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 28.7 m2/28.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 357.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 272.000.000

1. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 61.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.171.446.699

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.066.296.699



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.066.296.699

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.